

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat yang lazim disebut dengan UUD 1945. Ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang lazim disebut dengan KUHAP adalah merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang didalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam proses pidana. Proses pidana yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang penangkapan yang *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dan hal ini tidak lepas dari tahapan-tahapan penangkapan, pemeriksaan tersangka (*introgasi*) pada tingkat penyidikan.

Penyelidikan ada kalanya dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP), dimana didalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi serta dituangkan

dalam bentuk laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyidikan yang dimaksud didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan pada rumusan tersebut secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, kapan tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti*), dimana tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*), dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelakunya.

KUHAP telah mengatur mengenai tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana tercantum didalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut ;

1. ”Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Penyidik dalam melakukan penangkapan harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan sebagaimana diatur didalam Pasal 17 KUHAP haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1. ”Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup”.

Pengertian dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana antara lain berupa laporan pengaduan, keterangan, dan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 jo Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP juga menunjukkan bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang melainkan

hanya ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan suatu tindak pidana dan hanya boleh dilakukan untuk satu kali 24 jam setelah itu harus sudah dilepas jika tidak cukup bukti.

Penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perihal mengenai penangkapan hanya terjadi apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan sehingga penyidik tidak bisa sewenang-wenang melakukan suatu penangkapan. Penyidik juga harus mengetahui tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka agar dalam hal penyidikan polisi tidak melanggar hak-hak tersebut.

Tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik berhak memberikan keterangan secara bebas, harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karenanya wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka, maksudnya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Tersangka dalam pemeriksaan dimaksud tidak diperlakukan sebagai obyek melainkan harus diperlakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku melakukan suatu perbuatan dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam Pasal 52 KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik bukan untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi adalah untuk mendapatkan

keterangan tersangka mengenai kebenaran telah terjadi suatu perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada tersangka tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat terlihat bahwa penyidik diberi wewenang untuk menangkap seseorang, tetapi dalam realitasnya kadang kala terjadi kasus – kasus salah tangkap yang antara lain sebagai berikut:

1. Kejadian salah tangkap pernah terjadi pada tahun 1974 yaitu kasus yang menimpa Sengkon dan Karta yang terpaksa harus menjalani pidana penjara bertahun-tahun atas suatu kejahatan pembunuhan yang tidak pernah sama sekali mereka lakukan.¹
2. Ada juga kasus salah tangkap yang menimpa salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta di daerah yogyakarta yang bernama halis sabri. Halis sabri ditangkap oleh polisi hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 dengan tuduhan sebagai pelaku pemerkosaan.²
3. Peristiwa Gorontalo pada tahun 2002 dimana sepasang suami istri yakni Risman Lakoro dan Rostin Mahaji disangka dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap putri kandung mereka Alta Lakoro dan akhirnya dijatuhi pidana 3 tahun penjara namun beberapa tahun kemudian setelah mereka selesai menjalani pidana, putri kandung mereka tersebut kembali kerumah dalam keadaan sehat walaffiat.³

¹ <http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html>, senin 12 September 2010

² <http://www.zonaindo.com/2010/06/salah-tangkap-mahasiswa-polda-diy.html>, tanggal 15 September 2010

³ <http://www.antaranews.com/print/69586/pln-plans-to-allocate-rp62-tln-for-capex-next-year>, tanggal 11 september 2011

Mengacu pada peristiwa-peristiwa tersebut diatas maka seorang penyidik didalam melakukan kewenanganya pada proses penyidikan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan secara sewenang-wenang karena suatu penangkapan harus berdasarkan bukti awal yang cukup untuk menentukan apakah benar-benar seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang berdasarkan bukti awal yang tidak cukup untuk dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana seyogyanya penyidik tidak diperkenankan melakukan suatu penangkapan terhadap seseorang tersebut, bilamana penyidik melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut.

Oleh karena hal-hal yang telah diungkapkan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK DAN PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PROSES PENYIDIKAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang penyidik yang terbukti telah melakukan tindakan salah tangkap serta apa akibat hukum yang dijatuhkan oleh korp Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penyidik tersebut.
- b. Mengetahui bagaimana penegakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap agar korban salah tangkap dapat memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak penyidik selama dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis di bidang hukum pidana mengenai langkah-langkah pihak kepolisian khususnya dalam proses penyidikan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang patut diduga melakukan suatu tindak pidana berdasar pada bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh pihak penyelidik dalam proses penyelidikan.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

- 1) Hasil yang akan didapat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan bidang ilmu hukum.
- 2) Hasil yang didapat diharapkan bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai

bagaimana langkah-langkah pihak kepolisian dalam proses penyelidikan guna menentukan seorang tersangka yang akan diajukan ke proses penyidikan oleh pihak kepolisian serta akibat hukum bagi penyidik yang terbukti melakukan salah tangkap.

c. Bagi Masyarakat

Hasil yang akan didapat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan tambahan pengetahuan umum terhadap masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana kinerja dan langkah-langkah pihak penyidik kepolisian pada proses penyidikan dalam menentukan tersangka yang akan diperiksa.

d. Bagi Kepolisian

Hasil yang akan didapat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepolisian terutama penyidik agar lebih teliti dalam proses penyidikan dan lebih hati-hati dalam menentukan tersangka yang akan diperiksa oleh pihak penyidik.

D. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan saya sebagai penulis penelitian ini, permasalahan hukum yang saya teliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Namun apabila sudah ada peneliti lain yang telah meneliti sebelumnya dengan obyek yang sama, maka penelitian ini dapat menjadi pelengkap bagi hasil penelitian sebelumnya tersebut.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

E. Batasan Konsep

Pengertian salah tangkap atau *error in persona* adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju.⁴

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh dari pengertian tentang arti kata “lindung”, yaitu menempatkan diri atau bernaung dibawah suatu benda atau barang dengan tujuan untuk menghindar dari suatu hal yang dianggap dapat membahayakan diri.

Pengertian hukum menurut M.H. Tirtaamiddjaja, SH adalah semua aturan yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta.

Pengertian proses adalah jalannya suatu perkara atau pemeriksaan suatu perkara.⁵

Pengertian Penyidikan berdasar pada Pasal 1 butir 2 KUHP jo Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

⁴ Prof.Moeljatno,S.H, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana* , PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 193

⁵ J.C.T.Simorangkir, dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Offset, jakarta, hlm 134

republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidikan berdasarkan Kamus Hukum adalah usaha dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.⁶

Pengertian proses Penyidikan adalah suatu urutan pelaksanaan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kepolisian yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa serta menentukan tersangkanya.

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian Penyidik Pembantu menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶ Ibid., hlm 125

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selanjutnya syarat-syarat untuk dapat menjadi penyidik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP didalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Didalam Pasal 2 PP No. 27 Tahun 1983 tersebut mengatur mengenai syarat-syarat menjadi penyidik sebagai berikut :

1. Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda Pol).
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil disini diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawakan departemen tersebut, yang sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik dimaksud dalam point 1 maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Didalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 tersebut mengatur mengenai syarat-syarat menjadi penyidik pembantu sebagai berikut:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua polisi.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik pembantu dalam point 1 dan 2 diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ada pun jenis penelitian terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum terdiri dari:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkonisasi hukum.
- 4) Penelitian sejarah hukum.
- 5) Penelitian perbandingan hukum.

b. Penelitian hukum sosiologis atau empiris

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum terdiri dari:

- 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum

c. Penelitian Doktrinal

Penelitian hukum Doktrinal adalah penelitian hukum terdiri dari:

- 1) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif.
- 2) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.
- 3) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap norma-norma hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁸ Berdasarkan uraian diatas maka penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang kepolisian untuk menyelesaikan penulisan hukum mengenai pertanggungjawaban hukum penyidik dan perlindungan korban salah tangkap dalam proses penyidikan.

d. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Pasal 30 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945

⁷ Bambang Sunggono, SH., M.S., 1996, *Metodoli Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , hlm 41

⁸ Ibid., hlm. 42.

- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, seperti : teori, asas – asas, pendapat ahli, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum penyidik dan perlindungan korban salah tangkap dalam proses penyidikan.

e. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan bacaan yang berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang, naskah-naskah resmi yang ada dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai pertanggungjawaban

hukum penyidik dan perlindungan korban salah tangkap dalam proses penyidikan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai salah tangkap dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dengan melakukan wawancara kepada Bapak AKBP Budi Prayitno, S.H di kepolisian daerah istimewa yogyakarta, dimana peneliti telah menyusun pertanyaan secara terperinci dengan mengambil intinya, sehingga data-data yang diperoleh ada kaitannya dengan obyek yang diteliti yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum penyidik dan perlindungan korban salah tangkap dalam proses penyidikan.

f. Metode Analisis

Data dari hasil penelitian baik di perpustakaan maupun di lapangan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang selanjutnya digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan

hukum ini menjadi 3 bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Secara garis besar bab ini berisikan tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang Penyidikan, tinjauan umum tentang Penangkapn, Tanggung jawab Penyidik dan Perlindungan Korban Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti , serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini.